

FUNGSI DAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2009 (Studi kasus pada DPD PKS Kota Bandung)

Olih Solihin

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipati Ukur Bandung

olihmail@gmail.com

Abstract

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) making Islamic ideology as their struggling principle, get the public appreciation. Actually, in two election periods, 2004 and 2009, PKS still belong to be the one of big parties in Indonesia.

Bandung city as the one of PKS participant base was able to put the party being the winner of legislative election 2004. In 2009, however, the party occupying second position after Partai Demokrat.

The research aimed to find out function and political communication strategy of PKS in legislative election 2009 at the Bandung city. Meanwhile in purpose, it is to know of function including political leadership existence aggregation, articulation, recruitmen, and participation. And to know of strategy including political leadership existence, figure preservation, and institution stabilizaton, togetherness establishment, negotiation, and strategy of consensus development in achieve the political communication target for public political sustaining of legislative election 2009.

By the study, observer gain the description that in order to implement the function and political communication strategy, PKS of Bandung city always referred to the party platform, in accordance with the political character of Bandung city. However, there are any functions and strategy do not implement in optimum yet. Thus in legislative election 2009, the party only gains the second range after Parti Demokrat.

Keyword: Partai Keadilan Sejahtera, Function of Communication, Strategy of Communication, Political Commucation, Legislative Election

Abstrak

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadikan idiologi Islam sebagai landasan perjuangannya, mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Buktinya, dalam dua periode pemilihan umum (Pemilu), yakni tahun 2004 dan 2009, PKS masih bertahan dalam jajaran partai besar tanah air.

Kota Bandung yang menjadi salah satu basis massa PKS telah mampu menempatkan partainya menjadi pemenang pada pemilu legislatif tahun 2004. Namun pada pemilu legislatif 2009, PKS hanya mampu menjadi pemenang nomor dua setelah Partai Demokrat. Naik turunnya perolehan suara pada pemilu legislatif sangat ditentukan dan strategi komunikasi politik PKS dalam menghadapi pemilu legislatif 2009, di Kota Bandung. Fungsi komunikasi politik meliputi agregasi, artikulasi, sosialisasi, rekrutmen, dan partisipasi. Sedangkan strategi komunikasi politik meliputi strategi eksistensi pemimpin politik, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, negosiasi, dan strategi membangun konsensus dalam pencapaian tujuan komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan politik dari publik dalam menghadapi pemilu legislatif 2009.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran bahwa dalam menjalankan fungsi dan strategi komunikasi politiknya, PKS Kota Bandung selalu mengacu kepada *platform* partai, yang disesuaikan dengan karakteristik perpolitikan di Kota Bandung. Namun demikian, ada beberapa fungsi dan strategi komunikasi politik yang belum dilakukan secara optimal oleh PKS Kota Bandung. Sehingga pada pemilu legislatif 2009, partai ini hanya mampu menjadi pemenang nomor dua setelah Partai Demokrat.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Politik, Partai Keadilan Sejahtera, Pemilu Legislatif

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi politik melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik (Mas'ood dan Andrew, 1990: 130). Fungsi komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, gagasan yang berkembang dimasyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi membawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan pemerintah ke masyarakat.

Di mana hal ini oleh Gabriel Almond dilihatnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik atau merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi input yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Bagi Almond fungsi komunikasi politik yang terdapat secara *inherent* dalam sistem politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Sehingga efektif tidaknya fungsi ini dalam penyampaian pesan-pesan politik sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi input lainnya, seperti fungsi artikulasi kepentingan (*interest articulation function*) dan fungsi agregasi kepentingan (*interest aggregation function*) yang memang menjadi tanggung jawab infrastruktur politik, dalam hal ini partai politik. Pengaruh itulah yang membuat arus komunikasi politik berlangsung secara timbal balik (*two way traffic communication*), yaitu mengalir (a) dari bawah ke atas, yaitu dari masyarakat ke penguasa politik, dan (b) dari atas ke bawah, yaitu dari penguasa politik ke masyarakat (*public*).

Ada dua indikator yang dapat menunjukkan bahwa arus komunikasi politik berlangsung secara timbal balik, yaitu (1) fungsi agregasi kepentingan, dan (2) fungsi partisipasi politik (*political participation function*). Pemikiran yang mendasari fungsi agregasi kepentingan adalah arus komunikasi yang bersumber dari masyarakat dengan

sasaran kepada penguasa politik. Selain itu, efektivitas komunikasi politik juga sangat ditentukan oleh fungsi artikulasi, sosialisasi, dan rekrutmen dalam partai politik.

Di samping efektivitas pelaksanaan fungsi komunikasi politik yang dikemukakan oleh Almond, penulis menganggap sangat penting jika dibahas pula strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh PKS dalam memperoleh dukungan publik. Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik di masa depan (Arifin, 2003:145). Justru itu, keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan disetiap kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, merawat atau memelihara ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya, yang merupakan keputusan paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan.

Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Adapun strategi komunikasi politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah meliputi; (1) keberadaan pemimpin politik, (2) merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, (3) menciptakan kebersamaan, (4) negosiasi, (5) membangun konsensus. Secara singkat dari keseluruhan strategi komunikasi politik di atas akan dijelaskan berikut ini.

Inti dari demokratisasi adalah bagaimana membangun institusi-institusi politik demokratis, seperti partai politik, bekerja atas dasar prinsip akuntabilitas. Partai politik sebagai institusi demokrasi diharapkan dapat berperan sebagai agen yang dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya praktek demokrasi di masyarakat. Peran tersebut tentu

menuntut partai politik terlebih dahulu menerapkan nilai dan praktek-praktek demokrasi dalam dirinya sendiri ketika melaksanakan fungsi-fungsi input sistem politik, seperti fungsi komunikasi politik.

Di Indonesia, proses demokratisasi politik yang terus berlangsung pasca Orde Baru setidaknya telah mengarahkan sistem kepartaian dan pemilu yang dapat memberi peluang bagi perluasan partisipasi politik warganegara. Proses ini setidaknya telah menghasilkan sistem multipartai yang relatif otonom dan tidak hanya memberi ruang bagi munculnya sejumlah partai politik baru, tetapi juga sistem kompetisi sangat ketat untuk merebut dukungan politik yang lebih besar. Misalnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang pertama kali pada tahun 2004 dan pilkada untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati.

Sekalipun sistem ini terasa lebih demokratis dibanding sebelumnya, tetapi tetap saja merupakan ancaman bagi eksistensi partai politik. Sebab, ruang kompetisi yang diciptakan semakin tajam dan terbuka. Sehingga sistem ini dapat membuat partai gulung tikar bila ia tidak dapat berkompetisi dan beradaptasi dengan lingkungan politik yang sedang dan akan terus berubah terutama dalam melaksanakan fungsi dan strategi komunikasi politik. Sistem ini sudah tentu membawa dilema demokrasi karena di satu sisi aspirasi politik masyarakat yang terus berkembang menuntut partai politik dan pemerintah yang didukungnya harus menjadi adaptif. Di sisi lain partai politik dan pemerintah yang didukungnya juga memiliki sejumlah keterbatasan. Arena politik yang ada akan menjadi tempat pembantaian bagi partai politik yang tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi input sistem politik, sekaligus merupakan medan yang menguntungkan bagi partai politik yang siap beradaptasi dan berkompetisi secara *fair* untuk memperoleh dukungan secara luas dari masyarakat melalui pembentukan opini dan pencitraan partai politik.

Pada batas-batas tertentu PKS termasuk pihak yang diuntungkan oleh sistem tersebut. Sebagai partai politik junior sejak era-reformasi yang cenderung pada tipologi partai massa dan merupakan partai Islam yang baru, sehingga dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk beradaptasi dan bersaing dengan partai politik Islam lainnya. PKS yang lahir sejak era reformasi sampai saat ini setidaknya salah satu kadernya yaitu Hidayat Nur Wahid pernah menjadi Ketua MPR RI periode 2004-2009. Di Jawa Barat, PKS telah mampu menempatkan kadernya yaitu Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat, periode 2009-2014.

Pada pemilihan umum legistaltif 2009, PKS Kota Bandung telah menetapkan target 51 persen suara pemilih dalam pemilihan umum legislatif 2009. Selain akan memperluas segmen suara pada kelompok nasionalis dan sekuler, PKS juga akan mengandalkan militansi kadernya di Kota Bandung untuk menyukseskan target yang dicanangkan. Target 51 persen itu merupakan syarat yang diperlukan partainya agar dapat meraih \pm 50 persen kursi di DPRD Kota Bandung.

Kenyataannya, pada Pemilu Legislatif 2009, target yang sebelumnya ditetapkan 51 persen hanya meraih 18 persen atau 9 kursi di DPRD Kota Bandung. Dari hasil tersebut, memberikan gambaran bahwa PKS Kota Bandung dalam menjalankan fungsi komunikasi politik untuk mempengaruhi masyarakat atau konstituen belum sepenuhnya dilaksanakan.

Terkait perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009, DPD PKS Kota Bandung berupaya untuk melakukan perencanaan strategi yang sistematis dengan mengkonsolidasikan kekuatan internal partai, yang salah satunya adalah kader yang solid dan militan. Walaupun perolehan suara jauh dari target yang diharapkan, tetapi PKS Kota Bandung menjadikan Pemilu Legislatif 2009 sebagai agenda pengalaman politik dalam menyongsong eksistensi partai dimasa datang yang lebih baik.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap (1) Bagaimana implementasi fungsi komunikasi politik PKS yang meliputi fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, rekrutmen, dan fungsi partisipasi dalam mendapatkan dukungani politik dari publik/rakyat dalam menghadapi pemilu legislatif 2009? (2) Bagaimana strategi komunikasi politik PKS yang meliputi strategi eksistensi pemimpin politik, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, negosiasi, dan strategi membangun konsensus dalam pencapaian tujuan komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan politik dari publik/rakyat dalam menghadapi pemilu legislatif 2009?

2. Metode Penelitian

Untuk mengetahui fungsi dan strategi komunikasi politik PKS dalam menghadapi pemilu legislative 2009, diawali desain sebuah penelitian yakni dengan pemilihan topik dan pradigma dalam ilmu sosial (komunikasi pen.) dan ilmu tentang manusia membantu kita memahami fenomena. Paradigma tersebut mengajukan asumsi tentang dunia sosial, bagaimana ilmu pengetahuan harus dilaksanakan, dan apa yang menyumbang pada masalah, pemecahan masalah, dan kriteria bukti sah (Firestone, Gioia & Ptitre, Kuhn, dalam Creswell. 2002:1).

Penelitian kualitatif dirancang sesuai dengan asumsi paradigma kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Sebaliknya penelitian kuantitatif yang sesuai dengan paradigma kuantitatif, merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial atau masalah manusia yang berdasarkan pada

pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori itu benar (Creswell. 2002: 1)

Kajian penelitian ini adalah implementasi fungsi dan strategi komunikasi politik PKS. Paradigma penelitiannya adalah kritis, dengan pendekatan Studi Kasus (Causal Study) yang mengacu pada perspektif Lincoln dan Guba.

Pendekatan penelitian yang menggunakan paradigma kritis sangat menaruh perhatian terhadap pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik sebuah kenyataan yang tampak (virtual reality) guna dilakukannya kritik dan perubahan (critique and transformation) terhadap struktur sosial, dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh PKS dalam memberikan informasi politik kepada publik/rakyat. Secara ontologis, paradigma ini beranggapan bahwa realitas yang kita lihat adalah realitas semu; realitas telah terbentuk dan dipengaruhi oleh kekuasaan sosial, politik, ekonomi, etnik, nilai gender, dan sebagainya, serta telah terkristalisasi dalam waktu yang panjang. Tujuan penelitian ini sendiri adalah mengungkap faktor-faktor kesejarahan dan pengaruh kekuatan sosial, budaya dan ekonomi politik yang terdapat dibalik realitas sosial yang dibangun oleh PKS dalam melaksanakan strategi komunikasi politiknya kepada rakyat. Jadi secara ontologis, substansi penelitian ini telah mengikuti paradigma kritis.

Subjek penelitian ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bandung, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Bandung, Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Bandung, dan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Fungsi Komunikasi Politik PKS:

1) Fungsi Agregasi

Agregasi merupakan proses yang dilakukan oleh PKS Kota Bandung melalui

kader yang duduk di parlemen dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, seleksi dan merumuskan kepentingan yang telah diartikulasikan (disalurkan) untuk menjadi bahan perumusan kebijakan.

Kebijakan yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat ini akan tercapai melalui parlemen dalam menjalankan peran representasi, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Peran-peran parlemen seperti inilah yang dikenal dalam sistem demokrasi liberal. Parlemen ini pun tidak berdiri bebas dalam membawa kepentingan konstituennya karena harus melewati proses politik dengan para aktor dari lembaga lain seperti pemerintah (*eksekutif*), ormas dan lembaga bisnis. Oded Muhammad Danial (Ketua Majelis Pertimbangan Daerah dan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung) periode 2004-2009, mengatakan:

”Setiap akan mengeluarkan kebijakan, kami kader PKS selalu berkaca pada program partai. Namun harus diakui, sebuah kebijakan lahir harus mengkaomodir beragam kepentingan aktor-aktor yang ada. Dalam proses politik suatu kebijakan, masing-masing aktor dan lembaga tersebut berdiri dengan beragam kepentingannya. Beragam kepentingan inilah yang intensif mengisi ruang formulasi kebijakan, sampai akhirnya ada kesepakatan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses kebijakan publik itu berlangsung dalam ruang yang dipenuhi oleh beragam kepentingan, baik dari para aktor pemerintah, parlemen, masyarakat sipil atau pun para pelaku ekonomi.”

Peran parlemen dalam menghasilkan suatu kebijakan sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa peran dan fungsi parlemen dalam rangka menghasilkan kebijakan publik senantiasa berprinsip atas azas kebersamaan yang memberikan manfaat untuk publik. Namun dari sisi lain, ketika parlemen

berpegang pada dasar ajaran *Trias Politica*-nya Montesquieu, maka secara tegas akan memisahkan antara peran parlemen (pembuat kebijakan), eksekutif (pelaksana kebijakan), dan yudikatif (penilai kebijakan). Dalam kerangka pikir seperti ini berarti produk kebijakan seperti peraturan daerah (perda) seharusnya dibuat dan ditetapkan oleh parlemen. Tetapi apa yang dipraktikkan sejauh ini tidaklah murni menjalankan teori politik *model Trias Politica*. Sebagai bentuk kebijakan tertinggi di daerah, Perda kabupaten/kota yang sering berinisiatif membuat draft kebijakannya justru pihak eksekutif. Sedangkan pihak legislatif lebih sering berperan sebagai pembahas usulan maupun memberikan persetujuannya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penyusunan agenda kebijakan daerah berangkat dari kepentingan pemerintah daerah bukan berdasarkan kepentingan rakyat melalui parlemen. Situasi seperti ini bisa berdampak pada rendahnya kualitas dan legitimasi kebijakan daerah. Tidak nyambung antara masalah yang menimpa rakyat dengan solusi kebijakan yang dipilih pemerintah dan Parlemen.

2) Fungsi Artikulasi

Artikulasi merupakan proses politik yang mendasar dalam demokrasi. Demokrasi menganjurkan bahwa artikulasi merupakan jembatan antara warga dengan sistem politik atau pembuat kebijakan, dan artikulasi yang terlembaga dengan baik memelihara sistem demokrasi yang stabil, merawat legitimasi kebijakan, membangun kompetensi warga, menciptakan kepercayaan warga kepada sistem politik serta memperkuat kedaulatan rakyat.

Artikulasi kepentingan dalam bahasa sistem politik adalah penyampaian tuntutan (*demand*) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada sistem politik. Ia dibedakan secara tegas dengan proses pemilihan umum, sebagai bentuk proses politik warga menyampaikan dukungan (*support*) kepada sistem politik. Pengertian

lain, artikulasi adalah penyaluran aspirasi (*voice*) warga kepada pemerintah atau pembuat kebijakan. Mengingat begitu banyaknya aspirasi yang diartikulasikan, maka proses agregasi juga akan melakukan sortir dan penentuan prioritas kepentingan yang bakal dijadikan sebagai basis formulasi kebijakan. Seperti halnya proses perencanaan, proses agregasi dilakukan untuk membuat pilihan yang tepat dan sesuai dengan aspirasi warga di tengah-tengah kelangkaan sumberdaya ekonomi-politik.

Artikulasi selalu berbicara tentang bagaimana proses atau mekanisme yang bisa dijalankan baik oleh warga maupun oleh PKS Kota Bandung, Parlemen dan pemerintah. Haru Suandharu (Ketua DPD PKS Kota Bandung), periode 2004-2009, mengatakan:

"Harus kami akui bahwa artikulasi yang dijalankan PKS belum optimal. meskipun demikian, sejauh ini kami selalu membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk aktif dalam menyalurkan aspirasinya."

Proses artikulasi yang dilakukan secara bersama dan aktif oleh sistem politik (pemerintah dan Parlemen) bersama segmen-segmen warga masyarakat tentu juga berbasis pada kuatnya *popular space* dan *invited space*. Baik pengambil keputusan maupun unsur warga masyarakat melakukan dialektika atau dialog secara bersama, terbuka, dan kritis mengidentifikasi persoalan, mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil kesepakatan bersama, yang semua itu dijadikan sebagai basis pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Proses ini bisa sangat kondusif untuk membangun *mutual trust*, kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif.

3) Fungsi Sosialisasi

Agar program-program kerja partai bisa diketahui sekaligus difahami masyarakat luas, PKS Kota Bandung senantiasa

melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran media. Karena itu humas DPD PKS Kota Bandung berupaya merangkul media massa baik cetak maupun elektronik untuk pemuatan berita dan juga pemasangan iklan program. Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan sarana yang efektif untuk meyebarluaskan informasi. Karena keberadaannya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara massif. Bagi sebuah partai, media massa menjadi corong para pengurus partai untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dan informasi ke seluruh konstituennya. Mengingat pentingnya fungsi dari media massa, maka DPD PKS Kota Bandung memanfaatkan media massa untuk membentuk opini publik.

Selain menggunakan saluran media mainstream, PKS Kota Bandung juga memiliki beberapa media internal berupa tabloid bulanan yang dibagikan ke setiap DPC, buletin mingguan, buklet, liflet, brosur yang dibagikan secara cuma-cuma ke masyarakat. PKS Kota Bandung juga menampilkan informasi melalui jaringan internet, berupa situs partai yakni, www.pksbandung.com, situs jejaring facebook, friendster, dan lainnya.

PKS Kota Bandung juga melakukan sosialisasi melalui majelis pengajian, seminar, serta mengunjungi masyarakat secara langsung yang dikenal dengan *direct selling* partai. Informasi juga disampaikan melalui spanduk, baligo dan poster yang dipasang di tempat-tempat umum.

4) Fungsi Rekrutmen

Kader partai merupakan basis sebuah partai. Semakin banyak anggota semakin kuat partainya. Semakin banyak yang aktif anggota partai dan semakin banyak yang bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai, maka semakin kuatlah partai tersebut. Melihat kenyataan di atas, maka PKS Kota Bandung berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggota, selama mereka setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya. Setelah itu, juga menjaga agar yang sudah

menjadi anggota tetap puas sebagai anggota partai.

5) Fungsi Partisipasi

Partai yang berdiri pada era awal reformasi ini sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sebagai partai dakwah, apa pun yang dilakukan selalu mendasarkan diri pada logika dakwah, yang selalu mengajak untuk kebaikan. Tidak mudah untuk mempertahankan diri tetap di jalurnya. Namun, juga bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Pada pemilu mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mengusung slogan "Bersih, Peduli, dan Profesional". Tema "Bersih dan Peduli" pada Pemilu 2004 telah membangkitkan semangat kader pada masyarakat untuk memberikan dukungan. PKS di Jakarta kemudian bisa menjadi partai unggulan.

Dalam mewujudkan fungsi tersebut, PKS Kota Bandung juga membangun partisipasi politik perempuan di legislatif. Gambaran tentang rendahnya keterwakilan perempuan diberbagai lembaga politik formal khususnya di lembaga legislatif menegaskan bahwa sistem politik di Indonesia khususnya, dan umumnya negara-negara lain, telah mengucilkan perempuan. Ada beberapa faktor yang merupakan penyebab perempuan terkucil dari lembaga politik. Mulai dari kendala budaya dan tafsir agama, ekonomi, dukungan keluarga, hingga sistem politik itu sendiri yang memang tidak ramah terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haru Suandharu (Ketua DPD PKS Kota Bandung), periode 2004-2009 mengatakan:

"Kami menanggapi bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam membangun bangsa ini. Terkait soal perempuan, PKS sejak awal telah mengakomodir kaum perempuan untuk menjadi wakil rakyat. Terlebih ketika undang-undang menggariskan, harus ada kuota 30 persen kaum perempuan, kami menjawabnya dengan mudah karena

memang sudah sejak awal perempuan dilibatkan."

Implementasi Strategi Komunikasi Politik PKS

1) Eksistensi Pemimpin Politik

Sebagai partai kader, PKS punya logika yang berbeda dengan partai-partai lain, seperti Golkar, PKB, dan PDIP. Meskipun mereka menggap lahirnya tokoh itu penting, tetapi bagi PKS, ketokohan dan popularitas seseorang bukanlah hal utama dibanding menata mesin politik partai. Karena itu, selama ini PKS Kota Bandung kerap mengandalkan jalannya mesin partai dari "energi kader."

Namun demikian PKS Kota Bandung tidak menjadikan popularitas atau eksistensi pimpinan politik sebagai yang utama. PKS Kota Bandung malah lebih mengedepankan kinerja mesin partai. Sebagai partai yang menganut azas Islam, PKS Kota Bandung menekankan kepada kader-kadernya agar menghindari sikap pamrih dalam membesarkan partai. Pandangan seperti itu bisa melihat bagaimana cara berpikir dan berlogika orang-orang PKS Kota Bandung. Misalnya, PKS berani menampilkan Ahmad Heryawan dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat, padahal Ahmad Heryawan "bukan siapa-siapa" dibanding tokoh-tokoh seperti Agum dan Danny Setiawan di Jawa Barat. Terpilihnya Heryawan membuktikan bahwa kendaraan bermesin kader PKS ternyata mampu bekerja dengan baik, siapa pun pengendaranya.

2) Strategi Merawat Ketokohan & Memantapkan Kelembagaan

Meskipun tokoh bukanlah yang utama di PKS, tapi ternyata dalam Muiyawah Daerah (Muda) PKS Kota Bandung ditekankan, partai ini harus berupaya melahirkan tokoh-tokoh yang bisa dikenal masyarakat. Kader-kader yang sudah ditunjuk diperintahkan untuk selalu menjaga kredibilitas dan kapabilitasnya agar citranya selalu positif dimasyarakat. Namun demikian, dalam hal pengangkatan dan

perawatan tokoh ini PKS Kota Bandung masih memiliki banyak kelemahan.

PKS Kota Bandung belum sepenuhnya menjalankan amanat musda terkait upaya melahirkan sekaligus merawat kadernya menjadi tokoh di masyarakat. Meskipun di satu sisi belum optimalnya penokohan sebagai bentuk kelemahan, di sisi lain sebagai hal positif untuk menjaga internal partai tetap kondusif. Sehingga dengan munculnya dua anggapan itulah, wajar jika PKS Kota Bandung kurang bekerja optimal memunculkan kadernya menjadi tokoh.

3) Strategi Menciptakan Kebersamaan

PKS Kota Bandung menganggap bahwa kokohnya mesin partai hanya akan diwujudkan apabila kebersamaan, soliditas tumbuh menjadi budaya internal partai. Meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat dihargai penuh, tapi manakala terjadi perbedaan pendapat tidak sampai menimbulkan perpecahan di tubuh partai. Pasalnya, ditingkat kabupaten/kota, PKS membentuk Dewan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) yang memiliki fungsi seperti Majelis Syuro untuk tingkat pusat. Jadi semua kebijakan akan diputuskan di DSD, dan semua kader partai harus tunduk kepada keputusan tersebut.

Dalam penetapan calon anggota legislatif (caleg) atau di PKS dinamakan Calon Anggota Dewan (CAD) pada Pemilu Legislatif 2009, semuanya didasarkan pada keputusan DPTD. Karena itu, di PKS Kota Bandung nyaris tidak pernah terjadi perseteruan di antara sesama kadernya.

4) Strategi Negosiasi

Dalam dunia politik, negosiasi merupakan bagian terpenting untuk meraih kekuasaan-kekuasaan politik. Sudah barangtentu, partai politik yang pandai menjalankan negosiasi akan meraih kekuasaan. Adakalanya, negosiasi yang dijalankan bersifat buta, yakni menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan tersebut. Namun bagi PKS, negosiasi yang dijalankan harus selalu mengacu kepada platform partai.

Untuk mengakomodir semua kepentingan publik, platform partai disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Platform PKS yang dijalankan di Kota Bandung tentu berbeda dengan platform PKS yang ada Jayapura, Papua. Namun demikian, secara garis besar, platform-platform tersebut mengacu kepada visi dan misi PKS.

Untuk meraih tujuan partai, PKS Kota Bandung selalu melakukan negosiasi, baik melalui kader-kader partai yang duduk di DPRD Kota Bandung maupun oleh pengurus DPC/DPD PKS Kota Bandung. Jadi disemua level, negosiasi selalu dijalankan dengan syarat mengacu kepada platform partai. Kebijakan-kabijakan yang dibuat fraksi PKS Kota Bandung menyangkut segala aspek pembangunan di Kota Bandung sudah barang tentu sesuai dengan platform partai. Begitu dalam melakukan negosiasi dengan masyarakat, platform menjadi semacam 'kitab suci' yang harus disepakati semua pihak.

5) Strategi Membangun Konsensus

Konsensus merupakan bentuk demokrasi langsung, yang sangat berbeda dengan demokrasi representatif: para partisipan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan harian, melalui desentralisasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, sehingga pengambilan kontrol atas hidup sehari-hari menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Berbeda dengan demokrasi yang mengandalkan aturan mayoritas, nilai-nilai yang dianut demokrasi konsensus membutuhkan keterlibatan setiap individu secara setara; apabila ada satu saja orang yang tidak setuju dengan sebuah keputusan yang diambil, maka adalah tugas semuanya untuk menemukan solusi baru yang dapat diterima oleh semua. Sebagai partai Islam modern PKS Kota Bandung mempersilahkan semua kadernya untuk melakukan masukan, saran sekaligus kontrol terhadap kinerja partai. Agar setiap konsesus yang disepakati bermutu, maka pengurus DPD PKS Kota Bandung terlebih dulu memberikan pemahaman-pemahaman kepada semua kader mengenai garis besar perjuangan partai. Dengan begitu,

semua konsensus yang lahir selalu sesuai dengan amanat platform partai

4. Kesimpulan dan Saran

Dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif 2009, PKS Kota Bandung telah menjalankan fungsi dan strategi komunikasi politiknya untuk meraih dukungan konstituen. Namun tidak semua fungsi dan strategi dijalankan dengan optimal. Seperti halnya eksistensi pimpinan partai politik, PKS Kota Bandung tidak menjadikan populeritas atau eksistensi pimpinan politik sebagai yang utama, akan tetapi lebih mengedepankan kinerja mesin partai.

Meskipun tokoh bukanlah yang utama di PKS, tapi ternyata dalam Muayawarah Daerah (Muda) PKS Kota Bandung ditekankan, partai ini harus berupaya melahirkan tokoh-tokoh yang bisa dikenal masyarakat. Kader-kader yang sudah ditunjuk diperintahkan untuk selalu menjaga kredibilitas dan kapabilitasnya agar citranya selalu positif dimasyarakat. Namun demikian, dalam hal pengangkatan dan perawatan tokoh ini PKS Kota Bandung masih memiliki banyak kelemahan.

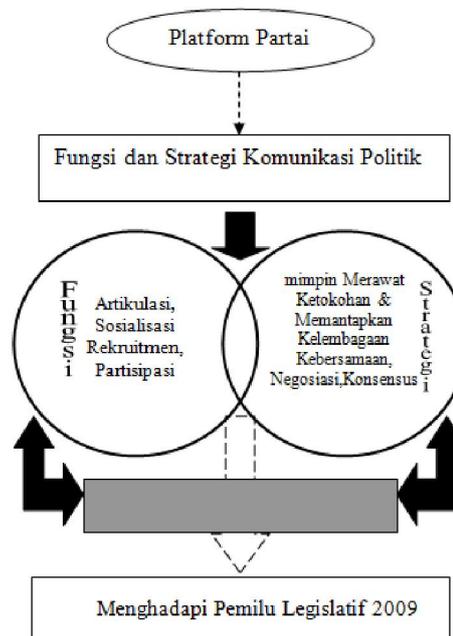
Begitu juga terkait strategi merawat ketokohan, PKS Kota Bandung belum sepenuhnya menjalankan amanat dalam upaya melahirkan serta merawat kadernya menjadi tokoh di masyarakat. Meskipun di satu sisi belum optimalnya penokohan sebagai bentuk kelemahan, di sisi lain sebagai hal positif untuk menjaga internal partai tetap kondusif. Sehingga dengan munculnya dua anggapan itulah, wajar jika PKS Kota Bandung kurang bekerja optimal memunculkan kadernya menjadi tokoh.

Model Komunikasi Politik PKS Kota Bandung

Berdasarkan temuan penelitian di atas, PKS Kota Bandung membangun sistem komunikasi politik menjelang Pemilu Legislatif 2009 secara utuh. Antara satu fungsi dan strategi yang satu dengan yang lainnya

saling berkaitan dalam rangka mensukseskan program partai. Seperti yang digambarkan dalam model komunikasi di bawah ini.

Gambar 4.1
Model Komunikasi Politik PKS Kota Bandung



Daftar Pustaka

- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 1981. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Almond, Gabriel, Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi Politik di Lima Negara*. Jakarta. Bina Aksara.
- Creswell, John. W. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches, Thousands Oaks*. London & New Delhi: Sage Publication.
- Suandharu, Haru. 2009. *Wawancara Penelitian Tesis di Kantor DPRD Kota Bandung Jalan Aceh*.

Danial, Oded, Wawancara Penelitian Tesis,
Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh.

Yin, Robert K. 1994. *Case Study Research
(Second Edition)*. London: Sage
Publication.

Dooley, L. M. 2005. *Case study research and
theory building. Advances in Developing
Human Resources*.